

Program Sesuai Target Meminimalisir Silpa



Sumber gambar : klikkaltim.com

Sangatta – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan 16 rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)ⁱ Bupati Kutim tahun anggaran 2023.

Pansus LKPJ Bupati Kutim diketuai oleh Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, diwakili oleh Sayid An-jas dan memiliki 8 anggota DPRD lainnya.

"Panitia khusus telah melakukan serangkaian pembahasan sebanyak 3 kali rapat, lalu uji petik sample proyek multiyears, kunjungan kerja hingga tahap finalisasi," ungkap Hepnie, Rabu (15/5).

Selanjutnya, Hepnie membacakan rekomendasi LKPJ Bupati Kutim tahun anggaran 2023. Pertama soal dokumen LKPJ yang merupakan dokumen akuntabilitas terhadap publik sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab. Sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sehingga implementasi kebijakan satu data nasional di daerah diperlukan untuk menjaga akurasi dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Mengingat beberapa data penting di beberapa OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) masih belum optimal. Untuk itu data para OPD perlu dioptimalkan.

Poin kedua yakni dokumen LKPJ dengan menyampaikan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan membandingkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Maka dengan target yang telah disusun, sehingga Bappeda sebagai leading sektor harus lebih cermat dalam penyusunan perencanaan. Sehingga program yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai target dan meminimalkan SiLPAⁱⁱ.

Kemudian, diperlukan optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen ASN dan PPPK.

"Rekomendasi yang ke-4, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, pengorganisasian program, transparansi informasi publik, penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan anggaran berbasis kinerja dalam kebijakan *money follow program* ⁱⁱⁱ," paparnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan rekomendasi poin kelima, merancang hilirisasi pertanian, peternakan, dan perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Sedangkan rekomendasi poin ke-6 perluas akses program untuk jaminan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan untuk keluarga rentan dan miskin.

Poin ke-7 melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pendidikan agar tercapai peningkatan SDM yang optimal.

Rekomendasi poin ke-8, merancang belanja APBD yang online dengan struktur pembentuk utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan skema memperbesar ruang fiskal belanja modal, belanja hibah, dan belanja program strategis di bidang pembentuk utama PDRB.

"Selanjutnya merancang skema pembiayaan APBD yang berorientasi pada meningkatnya daya dorong pertumbuhan ekonomi sektor formil maupun informal dengan fokus pertanian, perkebunan, perternakan, UMKM/perdagangan dan jasa melalui penguatan kelembagaan BUMD dan Kerjasama multi *stakeholder* dalam upaya mengantisipasi kondisi Kabupaten Kutai Timur pasca tambang," tegas-nya.

Rekomendasi ke-10, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur. Lalu, penyelesaian beban hutang yang masih ada dan juga menyikapi setiap temuan dengan segera agar tidak menjadi beban yang menghambat kinerja.

Rekomendasi ke-12, menyarankan Pemkab Kutim untuk meninjau kembali perjalanan dinas yang banyak menimbulkan Silpa agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal sehingga Pansus meminta perjalanan dinas jangan dilakukan sebelum DPA (dokumen pelaksanaan anggaran).

Sedangkan rekomendasi ke-13, penyusunan DPA paling lambat di bulan Januari agar penyerapan anggaran terutama pada belanja modal dapat dimaksimalkan.

"Lalu terkait program multiyears, pemerintah harus memaksimalkan anggaran yang tersisa di tahun 2024 dengan patokan pada skema multiyears yang telah disepakati dalam MoU," terangnya.

Lanjut, pengawasan teknis dalam proyek-proyek multiyears perlu diperketat sehingga capaiannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam skema.

"Terakhir, tindak lanjut masalah yang ditemukan pansus terkait program multiyears agar dapat dilakukan pendalaman dan pembahasan dalam komisi-komisi," pungkasnya.
(advertorial/ ril)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Program Sesuai Target Meminimalisir Silpa, 16/05/24
2. klikkaltim.com, Pansus LKPJ TA 2023 Pemkab Kutim Sampaikan 16 Rekomendasi, 16/05/24

Catatan:

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan, diatur ketentuan mengenai multiyears contract atau kontrak tahun jamak, yakni:

1. Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
 - a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
2. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. pekerjaan konstruksi; dan/atau
 - b. pekerjaan nonkonstruksi.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

ⁱⁱⁱ Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Yang dimaksud dengan "money follow program" adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari

berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.